



Kepemudaan di Kabupaten Lain Harus Diatur

Menyusul Adanya Aksi Klithih, Bisa Diwujudkan lewat Perda

JOGJA, Radar Jogja - Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sumadi berharap kabupaten di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) turut membuat peraturan terkait kepemudaan. Menyusul aksi *klithih* yang terjadi di Titik Nol Kilometer yang dilakukan oleh pemuda yang berasal dari luar domisili Kota Jogja.

Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja No 8/2022 tentang Pembangunan Kepemudaan. "Perda ini mewadahi seluruh pemuda di

Kota Jogja bukan hanya yang ber-KTP Jogja. Kami *kan* punya mahasiswa (dari luar DIJ yang berdomisili di wilayah, Red banyak," paparnya di wawancara *Radar Jogja*.

Sumadi menyebut, pemuda memiliki energi yang berlebih. Sehingga perlu diberi ruang agar potensinya tertuang pada hal positif dan tidak merugikan. "Anak-anak perlu eksistensinya diakui, maka kami siapkan ruang-ruang di Kota Jogja," ucapnya.

Oleh sebab itu, Sumadi mendorong kabupaten lain di DIJ untuk memperhatikan pemudanya. Komitmennya dilakukan dengan pembuatan perda. "Saya minta di kabupaten lain juga melakukan langkah yang sama.

Di kepolisian kami minta untuk bersinergi, agar ada langkah yang sama," ujarnya.

Berdasar survei dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Jogja menduduki peringkat pertama nasional dalam indeks pembangunan manusia (IPM). Di harapkan, melalui Perda Kepemudaan, dapat menekan aktivitas pemuda berkeliaran pada malam hari. "Sebetulnya kami sudah lakukan proteksi dan perlindungan pada anak. Kami juga sudah memiliki Perwal Jogja No 49/2022 tentang Jam Malam Anak," lontarnya.

Selanjutnya Sumadi menyinggung terkait aksi *klithih* yang terjadi di Titik Nol Kilometer. Berdasar informasi yang diteri-

manya, pelaku berdomisili di luar Kota Jogja. "Itu bukan warga Jogja. Tapi mereka berkegiatan itu. Maka kami sangat menyayangkan," sesalnya.

Sementara Kabid Humas JPW Baharuddin Kamba menekankan, harus ada ketegasan dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga penanganan terhadap kejahatan jalanan atau *klithih* dapat tuntas. Efektif atau tidaknya perda pun perlu dievaluasi. Sebab aturan terkait larangan keluar malam atau jam malam, tidak hanya di Kota Jogja. Tetapi juga berlaku di Kabupaten Sleman. "Nyatanya aksi kekerasan jalanan masih terjadi," cecarnya.

Kamba pun mengatakan, menyadarkan pemuda agar dapat

mengaktualisasikan diri ke arah positif tidak cukup dengan aturan. Tetapi implementasinya dari aturan tersebut tentunya tidak monoton. "Intinya, konsistensi pada tataran implementasi," ujarnya.

Kamba juga mencatat, aksi *klithih* yang terjadi pada awal tahun ini. Pada 12 Januari 2023, sekelompok orang melakukan aksi *klithih* di Jalan Baron, Padukuhan Sumuran, Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul. Polres Gunungkidul berhasil menangkap tujuh orang yang sebelumnya dikabarkan menjadi bulan-bulanan warga.

Selang tiga hari berikutnya tepatnya 15 Januari dini hari, kembali terjadi aksi bar-bar. Dilakukan

oleh sejumlah orang tidak dikenal mengakibatkan seorang perempuan berusia 54 tahun warga Dusun Putat 2, Patuk, Gunungkidul mengalami patah hidung. Mirisnya, korban *klithih* yang berprofesi sebagai pedagang pasar ini harus pulang secara paksa dari rumah sakit karena tidak memiliki biaya untuk operasi.

Kemudian pada 7 Februari, warga Kota Jogja dihebohkan dengan video viral aksi kekerasan jalanan di Titik Nol Kilometer. Aksi *klithih* ini terbilang tidak jauh dari kantor Polresta Jogja, dan Kraton Jogja. Akhirnya pada 9 Februari, kepolisian berhasil menangkap enam pelaku kekerasan itu. (fat/eno/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005